

Pola Komunikasi Organisasi Program Kawasan Mandiri Pangan di Kabupaten Bangka Tengah

Patterns Communication Organizations of The Kawasan Mandiri Pangan Program in Bangka Tengah District

Heri^{1,*}, Aida Vitayala S Hubeis², Annisa Utami Seminar²

¹Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah, Pemkab Bangka Tengah, 33181, Indonesia

²Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, IPB University, Bogor, 16680, Indonesia

*E-mail korespondensi: herioppo10144@gmail.com

Diterima: 22 Desember 2022 | Disetujui: 06 Juni 2023 | Publikasi Online: 07 Agustus 2023

ABSTRAK

Program Kawasan Mandiri Pangan (KMP) merupakan program bantuan pemerintah dibidang pangan/pertanian berupa pemberian modal usaha produktif (*on-farm, off-farm dan non-farm*). Penelitian bertujuan mendeskripsikan pola komunikasi program Kawasan Mandiri Pangan. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif dan rancangan penelitian studi kasus dengan jumlah informan 23 orang. Analisis data menggunakan aplikasi Nvivo 12 dan dibantu secara manual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi organisasi program Kawasan Mandiri Pangan di Kabupaten Bangka Tengah ada 2 jenis pola komunikasi. Pola komunikasi *chain pattern* terjadi pada tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian program KMP. Arah komunikasi organisasi dari atas ke bawah. Pesan yang disampaikan mengenai teknis-teknis pelaksanaan dan aturan program KMP. Frekuensi komunikasi 4 kali dalam 1 bulan. Pola komunikasi *star pattern* terjadi pada tahap *exit* strategi keberlanjutan program KMP. Arah komunikasi didominasi dari bawah ke atas, pesan lebih banyak mengenai pengelolaan modal usaha, kekompakan kelompok dan pemasaran produk. Frekuensi komunikasi hanya 1 kali dalam 1 bulan.

Kata kunci : Program KMP, pola komunikasi organisasi, usaha produktif

ABSTRACT

The Kawasan Mandiri Pangan Program (KMP) is a government assistance program in the food/agriculture sector in the form of providing productive business capital (on-farm, off-farm, and non-farm). Study aims to describe the communication patterns of the KMP Program. Research uses a constructivist paradigm with a qualitative approach and a case study research plan with a total of 23 informants. Data analysis using the N-Vivo 12 application and assisted manually. The results showed that there are 2 types of organizational communication in the KMP Program in Bangka Tengah Regency. The chain pattern communication pattern occurs in the stages of preparation, growth, development, and independence of the KMP program. The direction of organizational communication from top to bottom. The message conveyed regarding the technical implementation and rules of the KMP program. The frequency of communication 4 times in 1 month. The star pattern communication pattern occurs at the exit stage of the KMP program sustainability strategy. The direction of communication is dominated from the bottom up, with more messages regarding business capital management, group cohesion, and product marketing. The frequency of communication is only 1 time in 1 month.

Keywords: KMP program, productive business, organizational communication patterns



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia.

E-ISSN: [2442-4110](https://doi.org/10.25015/19202345024) | P-ISSN: [1858-2664](https://doi.org/10.25015/19202345024)

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian, dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi kemampuannya, peluang pemecahan masalah, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien dan berkelanjutan ([Kementan] Kementerian Pertanian Republik Indonesia RI, 2017). Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah melalui Pendamping program Kawasan Mandiri Pangan dan organisasi yang berada di tingkat kecamatan dan organisasi yang berada di tingkat desa. Kegiatan pendampingan ditujukan kepada organisasi di tingkat desa yaitu para penerima manfaat program yang berada di wilayah rawan pangan.

Wilayah Kepulauan Bangka Belitung memiliki ketahanan pangan yang sangat bergantung kepada pasokan bahan pangan dari luar daerah. Keadaan cuaca yang tidak menentu menjadi permasalahan yang menyebabkan pada musim tertentu bahan pangan tidak bisa masuk ke wilayah kepulauan. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam pemenuhan pangan bagi masyarakatnya. Kementerian Pertanian melaksanakan program Kawasan Mandiri Pangan (KMP) dalam rangka pemenuhan pangan dan kemandirian pangan di wilayah kepulauan. Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan program Kawasan Mandiri Pangan (KMP) yang melayani dan memberdayakan masyarakat miskin di desa-desa yang rawan dan rentan pangan. Menurut Sukarji (2017), permasalahan yang sering ditemui dalam organisasi adalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Komunikasi tidak terjalin baik secara vertikal maupun horizontal. Terdapat lima pola komunikasi organisasi menurut (De Vito, 2019) sebagai berikut: (a) *chain pattern*, (b) *Y pattern*, (c) *wheel pattern*, (d) *circle pattern*, dan (e) *star pattern*. Pola komunikasi organisasi terjadi dalam pelaksanaan program Kawasan Mandiri Pangan di lapangan. Pola komunikasi organisasi yang terjadi yaitu antara pihak pemerintah dengan masyarakat (penerima manfaat program pembangunan) serta dengan pihak swasta. Littlejohn (2014) menjelaskan teori Karl Weick dan James Taylor bahwa pola-pola komunikasi akan berkembang seiring waktu dalam sebuah organisasi. Salah satu cara untuk melihat susunan organisasi adalah dengan menguji pola-pola interaksi untuk melihat siapa yang berkomunikasi dengan siapa. Karena tidak ada seorangpun yang berkomunikasi dengan sama dengan semua anggota organisasi.

Ali & Anisti (2015) menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi yang bersifat informal serta suasana kekeluargaan yang diciptakan dalam proses evaluasi berpengaruh besar pada perubahan perilaku dan kinerja partisipan Forum Leader. Widiarto (2018) menunjukkan bahwa komunikasi vertikal yang dilakukan adalah komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas dilakukan oleh karyawan dengan membuat laporan kerja kepada pimpinan yang disampaikan melalui kepala bagian masing-masing departemen sesuai dengan *job discription* mereka.

Berdasarkan studi literatur terdapat banyak penelitian terdahulu mengenai pola komunikasi organisasi, (Hariani et al., 2017), (Simanjuntak, 2017), (Agustini et al., 2020), (Djamereng & Irmayana, 2018), (Sarah & Waluyo, 2020), (Anastasya et al., 2019), (Mahmud & Swarnawati, 2020), bahwa arah komunikasi organisasi yang terjadi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas dan ke segala arah, tergantung dari aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh para aktor komunikasinya.

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian tentang pola komunikasi organisasi pada program Kawasan Mandiri Pangan di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipandang perlu dilakukan untuk melihat pola komunikasi organisasi mulai dari arah komunikasi, isi/pesan komunikasi dan frekuensi komunikasi. Penelitian pola komunikasi organisasi pada program Kawasan Mandiri Pangan menarik untuk dilakukan karena sampai saat ini penelitian atau kajian yang secara spesifik membahas tentang pola komunikasi organisasi pada program Kawasan Mandiri Pangan belum pernah dilakukan khususnya di Kabupaten Bangka Tengah.

Penelitian bertujuan mendeskripsikan pola komunikasi. Penelitian dilakukan dengan maksud untuk prospek pengembangan program Kawasan Mandiri Pangan yang lebih baik dimasa yang akan datang terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Kabupaten Bangka Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif. Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, karena ideal untuk menyelidiki fenomena. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder sebagai data pendukung diperoleh melalui dokumen atau arsip yang relevan dengan penelitian. Penelitian menentukan jumlah informan sebanyak 23 orang. Informan diperoleh dengan menetapkan informan melalui wawancara kepada penerima bantuan dan terus berkembang menyesuaikan penerima manfaat yang didapat sehingga menghasilkan informan yang sama dalam jawaban dan penjelasannya. Teknik analisis data yang digunakan model interaktif (Miles et al., 2014) yaitu: 1) kondensasi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis data kualitatif menggunakan aplikasi Nvivo 12 dan dibantu secara manual.

Penelitian berangkat dari pemikiran mengenai kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan wilayah rentan dan rawan pangan, bahan pangan masih tergantung dari luar daerah. Keberhasilan program KMP sangat bergantung pada aktivitas komunikasi Pendamping program KMP atau pola komunikasi organisasi (arah, isi/pesan, frekuensi) yang mereka lakukan. Penelitian telah dilakukan di lima Desa Kawasan Mandiri Pangan yaitu Desa Guntung, Desa Terentang III, Desa Penyak, Desa Kurau dan Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*), karena desa-desa penerima bantuan program Kawasan Mandiri Pangan. Beberapa pertimbangan lain adalah lima desa tersebut merupakan wilayah daerah rentan rawan pangan, namun memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah yang mandiri pangan. Pertimbangan dalam pemilihan desa yang dijadikan objek penelitian ini telah memenuhi kaidah sumber data yang akan diolah dengan melihat kasus yang dimiliki sesuai dengan kerangka teori yang digunakan untuk menjawab pola komunikasi yang terbentuk di lapangan (Miles et al., 2014). Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Februari 2022- Mei 2022.

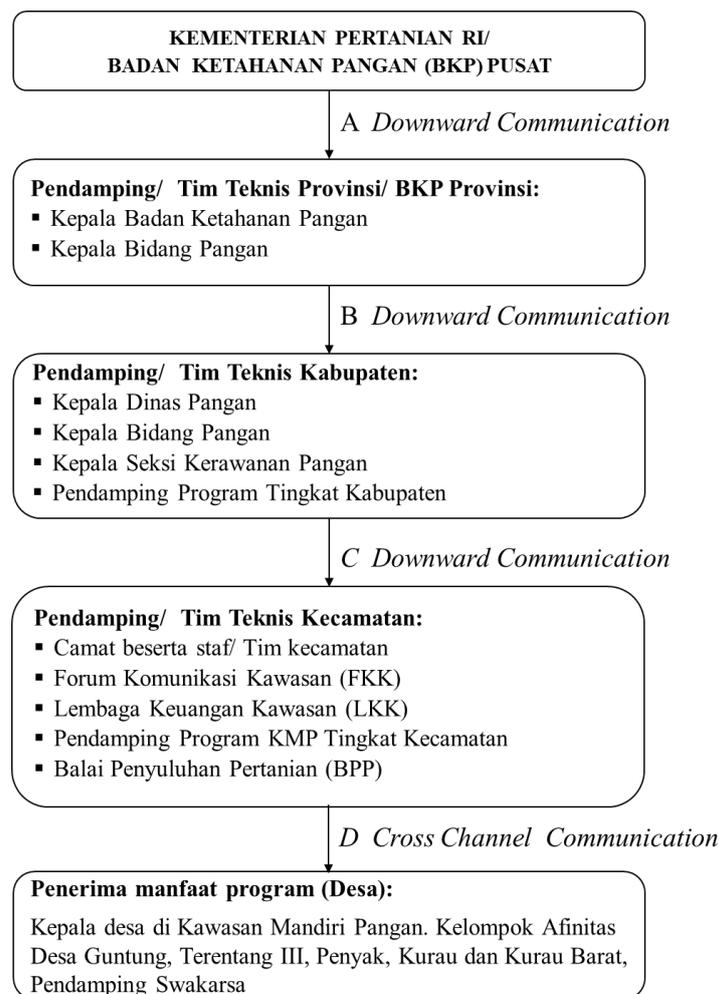
HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Kepulauan Bangka Belitung memiliki ketahanan pangan yang sangat bergantung kepada pasokan bahan pangan dari luar daerah. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam pemenuhan pangan bagi masyarakatnya. Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan program Kawasan Mandiri Pangan yang melayani dan memberdayakan masyarakat miskin di desa-desa yang rawan dan rentan pangan. Pola komunikasi organisasi pada tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian, berjenjang mulai dari organisasi tingkat pusat hingga ke tingkat desa. Pola komunikasi organisasi yang terjadi berbentuk pola rantai atau *chain pattern*. Arah komunikasi yang terjadi yaitu dari atas ke bawah atau *downward communication* dan *cross channel communication*. Pola komunikasi organisasi pada tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian disajikan pada Gambar 1 (halaman 32).

Berdasarkan Gambar 1 pola komunikasi organisasi pada tahap awal program KMP berbentuk pola rantai "*chain pattern*", pesan dalam pola ini disampaikan oleh satu orang dan memperoleh *feedback* kemudian disampaikan kepada orang lain dan seterusnya membentuk mata rantai yang terus memanjang. Arah komunikasi yang terjadi yaitu dari atas ke bawah atau *downward communication* dan arah komunikasi yang terjadi dalam organisasi di antara seseorang dengan orang lain yang satu sama lain berbeda dalam kedudukan dan bagian atau *cross channel communication*.

Pendamping program KMP yang telah menerima informasi mengenai program KMP meneruskan kepada Pendamping program KMP lainnya dan kepada Pengurus Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Forum Komunikasi Kawasan (FKK), Kepala Desa, hingga kepada penerima manfaat program KMP yaitu seluruh pengurus dan anggota yang berada di lima desa Kawasan Mandiri Pangan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan penelitian.

"ya, pada saat itu setelah selesai melakukan rapat dan pembentukan pengurus, saya ditugaskan untuk menginformasikan kepada masyarakat di 5 kawasan afinitas tersebut yaitu dari afinitas guntung, terentang, penyak, kurau dan kurau barat bahwa kami harus memberitahukan informasi ini kepada masyarakat pelaku usaha bahwa ada program yang namanya lembaga keuangan kawasan". (AKS, Desa Terentang III/ 01/03/2022)



Gambar 1. Pola Komunikasi Organisasi “*chain pattern*” Program KMP Tahap Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan dan Kemandirian. (Hasil Wawancara dan observasi lapangan dengan informan penelitian, 2022)

Pola komunikasi organisasi pola rantai atau *chain pattern* yang terbentuk pada tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian program KMP memiliki dampak terhadap Pendamping program KMP dan penerima manfaat program KMP. Pelaksanaan program KMP memiliki dampak terhadap aktivitas komunikasi dan kesejahteraan penerima manfaat program KMP. Adanya pola komunikasi rantai atau *chain pattern* berdampak terhadap aktivitas komunikasi selama program KMP berjalan meliputi: 1) dampak program KMP terhadap kemampuan komunikasi Pendamping program KMP, dan 2) dampak program KMP terhadap kemampuan komunikasi kelompok afinitas.

Dampak program KMP terhadap kemampuan komunikasi Pendamping program KMP meliputi: 1) kemampuan mengorganisir kelompok, 2) kemampuan memimpin anggota kelompok (*leadership*), 3) kemampuan menggunakan bahasa dalam pendampingan program KMP, 4) kemampuan komunikasi Pendamping program KMP dalam menyampaikan isi/pesan komunikasi, dan 5) kemampuan komunikasi Pendamping program KMP dalam menjalin komunikasi dengan organisasi lainnya (mitra pendamping).

Dampak program KMP terhadap kemampuan komunikasi kelompok afinitas program KMP meliputi: 1) kemampuan pengurus kelompok afinitas dalam mengumpulkan anggota kelompok dalam rapat kelompok, 2) kemampuan pengurus kelompok dalam menjalin komunikasi dengan Pendamping program KMP di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat, 3) kemampuan pengurus dalam meneruskan informasi program KMP yang telah didapat dari Pendamping program KMP, 4) Kemampuan pengurus kelompok dalam menyampaikan laporan perkembangan program KMP, 5) kemampuan pengurus kelompok dalam menjaga kekompakan kelompok, 6) kemampuan komunikasi anggota kelompok afinitas dalam mengikuti rapat/pertemuan kelompok.

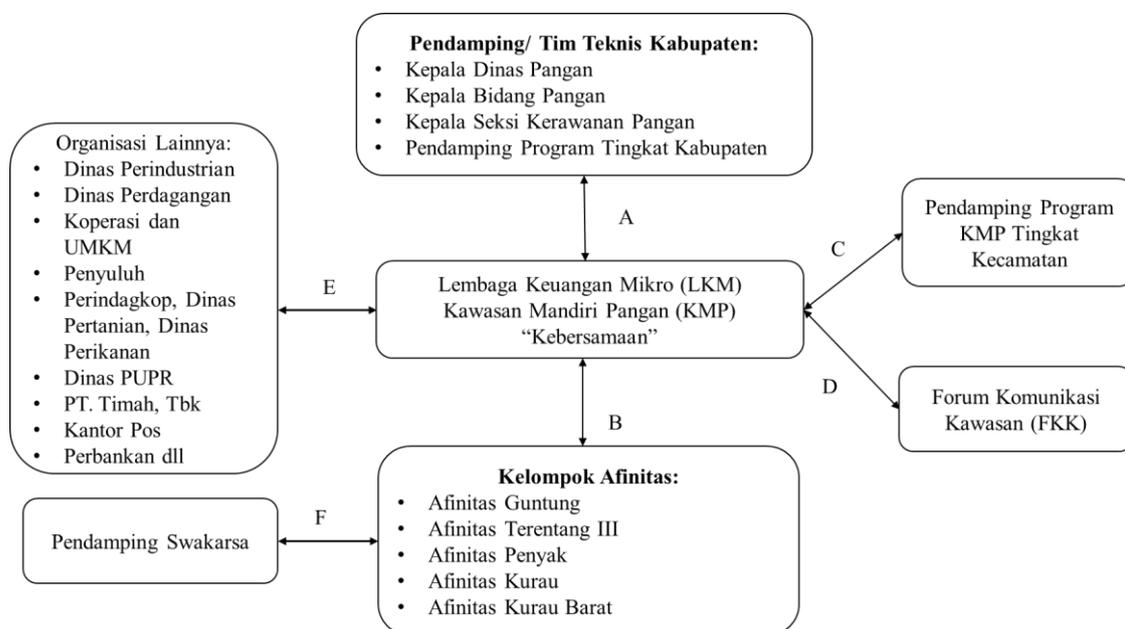
Dampak lain dari pola komunikasi organisasi “*chain pattern*” adalah dapat dilihat dari terbentuknya kelompok afinitas, tersalurkan dana program KMP sampai ke tingkat desa, terbentuknya Tim Teknis di

tingkat kabupaten, kecamatan dan terjadinya komunikasi yang efektif antar Pendamping program KMP dengan penerima manfaat program KMP. Selain itu, pola komunikasi organisasi “*chain pattern*” berdampak pada perputaran dan pengembalian dana program KMP oleh penerima manfaat berjalan sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman (SPP). Dana yang telah dikembalikan oleh kelompok kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) selanjutnya disalurkan kembali anggota kelompok penerima manfaat yang membutuhkan.

Pola komunikasi organisasi “*chain pattern*” juga berdampak terhadap berkembangnya usaha dibidang budidaya (*on-farm*), pengolahan (*off-farm*), dan usaha lainnya di luar bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan (*non-farm*) di lima desa Kawasan Mandiri Pangan. Tim Teknis tingkat kabupaten meneruskan isi/pesan komunikasi yang didapat dari organisasi yang berada di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kepada organisasi yang berada di bawahnya yaitu Tim Teknis kecamatan dan desa. Hal ini berdampak baik terhadap pelaksanaan program KMP di tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian, meskipun isi/pesan komunikasi yang disampaikan tidak semuanya bisa diterima oleh penerima manfaat program KMP di Kabupaten Bangka Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi di lapangan, pola komunikasi organisasi “*chain pattern*” pada program KMP di Kabupaten Bangka Tengah juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari pola komunikasi organisasi “*chain pattern*” adalah adanya beberapa isi/pesan komunikasi yang disampaikan oleh Pendamping program KMP masih kaku dan umum. Hal ini mengakibatkan ada beberapa pelaku usaha yang tidak bisa memanfaatkan dana program KMP, padahal mereka memiliki usaha ekonomi produktif yang bisa untuk dikembangkan. Sebaiknya Tim Teknis program KMP harus lebih teliti dalam menyampaikan pesan seperti memverifikasi jenis usaha yang boleh atau tidak untuk mendapatkan dana pinjaman program KMP. Pendamping program yang terlibat harus benar-benar melakukan pendampingan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pola komunikasi organisasi program KMP mengalami perubahan pola dari pola komunikasi “*chain pattern*” menjadi pola komunikasi “*star pattern*”. Pola komunikasi organisasi “*star pattern*” terjadi pada tahap *exit* strategi keberlanjutan program. Setiap anggota kelompok afinitas dalam pola komunikasi *star pattern* dimungkinkan berkomunikasi satu sama lainnya tanpa batasan-batasan hubungan antar anggota, sehingga setiap anggotanya bebas berkomunikasi dengan siapapun. Pola komunikasi organisasi pada tahap *exit* strategi keberlanjutan program KMP disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pola Komunikasi Organisasi “*Star Pattern*” Program KMP Tahap *Exit* Strategi Keberlanjutan di Kabupaten Bangka Tengah. (Hasil Wawancara dan observasi lapangan dengan informan penelitian, 2022)

Berdasarkan Gambar 2 (halaman 33) berubahnya pola komunikasi organisasi program KMP pada tahap *exit* strategi keberlanjutan disebabkan karena perlunya koordinasi dan co-orientasi/penyamaan tujuan yang sama, hal ini sesuai dengan teori organisasi dari James Taylor. Dampak positif dari pola

komunikasi organisasi “*star pattern*” pada tahap *exit* strategi keberlanjutan program KMP adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lebih mudah melakukan komunikasi dengan organisasi lainnya. Namun komunikasi organisasi “*star pattern*” memiliki dampak negatif pada tahap *exit* strategi keberlanjutan program KMP diantaranya: 1) kurangnya koordinasi antara Pendamping program KMP dengan penerima manfaat, 2) kurangnya koordinasi antar sesama Pendamping program KMP di berbagai tingkatan, 3) berkurangnya fungsi pengawasan program KMP yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Kawasan (FKK), 4) Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah hanya menunggu informasi perkembangan program dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui laporan bulanan LKM, dan 5) penyaluran dana ke kelompok afinitas sudah jarang melibatkan Pendamping program KMP tingkat Kecamatan, dan tidak lagi melakukan tahapan analisis usaha, verifikasi usaha dari calon penerima manfaat program KMP. Adanya dampak positif dan dampak negatif dari pola komunikasi organisasi “*Star pattern*” seharusnya menjadi perhatian khusus dari Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah untuk terus memberikan pendampingan, dukungan dan perhatian kepada organisasi-organisasi atau para fasilitator program KMP yang berada di bawahnya.

Pola komunikasi organisasi *chain pattern* dan *star pattern* pada program Kawasan Mandiri Pangan (KMP) di Kabupaten Bangka Tengah berbeda dengan penelitian dari (Brahmana & Sitepu, 2020) menunjukkan bahwa pola komunikasi organisasi dalam peningkatan kinerja pegawai di Kantor Lurah Gung Leto Kecamatan Kabanjahe memakai pola komunikasi roda, dimana pimpinan berada pada posisi sentral dan berpengaruh dalam proses penyampaian pesan dan semua informasi yang berjalan harus terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan. Perbedaan pola komunikasi ini disebabkan karena perbedaan aktivitas komunikasi yang dilakukan Pendamping program KMP, selain itu pada program KMP melibatkan banyak organisasi setiap tahapan pelaksanaan program KMP. Organisasi yang terlibat tidak hanya pada tingkat desa namun melibatkan organisasi di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Organisasi yang terlibat tidak hanya dari pihak pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun juga pihak swasta seperti PT.Timah Tbk, PT.PLN Persero, Perbankan, dan organisasi lainnya yang bermitra dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Perbandingan pola komunikasi dari segi arah, isi dan frekuensi komunikasi pada program KMP di Kabupaten Bangka Tengah disajikan secara ringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Pola komunikasi program KMP di Kabupaten Bangka Tengah

Uraian	Tahapan Program Kawasan Mandiri Pangan	
	Tahap Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan dan Kemandirian	Tahap <i>Exit</i> Strategi Keberlanjutan Program Kawasan Mandiri Pangan
Bentuk Pola Komunikasi Organisasi	Pola rantai (<i>chain Pattern</i>)	Pola bintang (<i>star pattern</i>)
Arah Komunikasi	<i>Downward communication</i>) dan <i>cross channel communication</i>	<i>Upward communication</i> , namun pada situasi tertentu arah komunikasi bisa saja berubah menjadi <i>downward communication</i>
Isi/Pesan Komunikasi	Pedoman umum, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan program KMP, tujuan dan manfaat program KMP, Pembentukan Tim Teknis, Data Dasar Rumah Tangga (DDRT), Sasaran Rumah Tangga (SRT), Rencana Usaha Kelompok (RUK), Rencana Usaha Anggota (RUA), Rencana Usaha Bersama (RUB), persyaratan program KMP, AD/ART kelompok, jenis usaha produktif, kekompakan dan administrasi kelompok, teknik-teknik budidaya tanaman pertanian, pengolahan produk, dan pemasaran produk usaha anggota kelompok afinitas	Pedoman umum, petunjuk teknis, administrasi dan pembukuan kelompok, manfaat program Kawasan Mandiri Pangan, kriteria usaha anggota kelompok, usaha simpan pinjam, pengembalian dana pinjaman, teknik budidaya, pengolahan produk hasil pertanian dan perikanan. pengemasan produk, pemasaran produk anggota kelompok afinitas, persyaratan-persyaratan pinjaman, Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kelompok, inovasi produk, pengelolaan gaji Pengurus LKM, kekompakan kelompok, kelembagaan, manajemen usaha, dan pemanfaatan modal usaha
Frekuensi Komunikasi	Minimal 4 kali dalam sebulan, lama waktu pertemuan 1 sampai 3 jam di berbagai lokasi pertemuan	Minimal 1 bulan sekali, lama waktu pertemuan tergantung agenda, pertemuan hanya di sekretariat LKM, hanya dengan kelompok afinitas yang aktif saja

Sumber: Hasil wawancara dengan informan 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, terdapat banyak temuan masalah komunikasi organisasi pada program KMP di Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi arah komunikasi, isi/pesan komunikasi dan frekuensi komunikasi. Hasil temuan lapangan mengenai pola komunikasi (arah komunikasi), diawali dari Pendamping program KMP tingkat kabupaten yaitu: Ketua Tim Teknis kabupaten dalam membalas SMS dan *whatsapp* dari anggota kelompok afinitas hanya sesekali saja membalasnya. Hal ini disebabkan Ketua Tim Teknis kabupaten ingin komunikasinya secara berjenjang mulai dari kelompok tingkat desa, kecamatan baru ke tingkat kabupaten, selain itu adanya kesibukan lain dari ketua Tim Teknis kabupaten.

“Kita ini kan sebaiknya dalam bertanggung jawab kegiatan ini saya berjenjang yah baik seperti itu berjenjang. Kalau semua sms atau wa masuk Kepala Dinas kita tanggapi nanti pertama itu akan menjadi satu kebiasaan, yang kedua tanggung jawab secara struktural yang di bawah Kepala Dinas nanti “mandul” yah itu nanti kalo semua sudah diselesaikan oleh Kepala Dinas, itu enggak tahu, enggak ada batasan waktu, batasan ya mungkin juga pengetahuan, kalo teknis ini kan di bidang yang tahunya kami tidak mungkin bisa menghafalkan semuanya, nah itu saya sesekali saya jawab alasan saya tolong ke bidang saja yah koordinasikan gitu kan, itu seperti itu yang saya lakukan”. (ERD, Kota Koba, 25/02/2022)

Keterdedahan media sosial dari para pendamping program KMP masih terbatas dan menyebabkan adanya keterlambatan informasi terhadap program. Temuan dari (Pahlawan & Prabowo, 2020) menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi dalam penggunaan media sosial berpengaruh 30% terhadap aktivitas pendampingan.

Temuan pola komunikasi (arah komunikasi) selanjutnya adalah jika ada pergantian pendamping program KMP, bagi Pendamping baru tidak ada lagi pelatihan/*Training of Trainer (ToT)*, sehingga menyebabkan pengetahuan pendamping baru tidak sama dengan pendamping program KMP sebelumnya. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah seharusnya terus memberikan pelatihan-pelatihan bagi Pendamping program KMP yang baru. Namun pada tahap *exit* strategi keberlanjutan program KMP tidak ada lagi pelatihan-pelatihan mengenai tupoksi Pendamping program KMP. Hal ini menyebabkan Pendamping baru harus memiliki inisiatif, rajin bertanya, dan harus bisa beradaptasi terkait pendampingan yang akan dilakukannya. Tidak adanya pelatihan-pelatihan bagi Pendamping program KMP diungkapkan oleh informan penelitian.

“kalau secara khusus training atau ToT (Training of Trainer) khusus yah, kebetulan mungkin di era saya tidak mengalami dulu-dulu, kalo sekarang sudah kewenangan provinsi. Jadi kalau saya pernah ngikutin pelatihan khusus (tidak), tapi mungkin kawan-kawan bidang ada, mungkin yah saya belum menanyakan secara langsung, tapi intinya sekarang bahwa saya sebagai penerus saya sudah baca-baca sudah buka-buka, sudah paham arahnya bahwa KMP itu kegiatan yang harus berkelanjutan”. (ERD, Kota Koba, 25/02/2022)

Keberlanjutan pendampingan memberikan signifikansi terhadap sasaran penerima manfaat program, hal ini selaras dengan temuan (Euriga, 2018) bahwa kemampuan Pendamping program dalam mendampingi kelompok afinitas memberikan dukungan terhadap proses berlangsungnya usaha ekonomi produktif (Bagherzadeh et al., 2021).

Temuan masalah pola komunikasi (arah komunikasi) selanjutnya adalah penyampaian informasi lebih sering direspon oleh pengurus Lembaga Keuangan Mikro dibandingkan dengan kelompok hal ini disebabkan karena keterwakilan kehadiran kelompok afinitas tidak mewakili, sehingga apa yang disampaikan oleh Tim Teknis kabupaten kurang direspon oleh kelompok. Seharusnya anggota kelompok harus lebih responsif menanggapi informasi yang telah disampaikan oleh Tim Teknis kabupaten. Apabila banyak anggota kelompok yang tidak hadir maka isi/pesan komunikasi tidak bisa sampai semuanya kepada anggota kelompok afinitas dan bisa berbeda-beda isi/pesan komunikasi yang diterima. Selain itu, perlu pengulangan penyampaian isi/pesan kepada anggota kelompok afinitas agar isi/pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh anggota Tim Teknis kabupaten Ibu Cyn umur 39 tahun.

“baik, untuk penyampaian materi ini sebenarnya kehadiran dari kelompok itu sendiri, terkadang keterwakilan kehadiran tidak mewakili sehingga apa yang kita sampaikan itu kurang direspon untuk kelompok afinitasnya ya karena yang sering hadir itu ya malah dari lembaga

keuangan masyarakatnya ketimbang dari perwakilan kelompok afinitas itu sendiri”. (CYN, Kota Koba, 21/02/2022)

Keaktifan dalam interaksi kelompok terhadap pendamping tingkat kabupaten memiliki hubungan yang erat untuk dapat suksesnya penerimaan informasi dan pendampingan ke kelompok afinitas (Euriga, 2018). Hal ini didukung oleh temuan dari (Hermawan, 2017) menunjukkan bahwa partisipasi kelompok memiliki andil terhadap fungsi berjalannya kelompok dengan baik dalam menggerakkan partisipasi anggota kelompok afinitas.

Temuan masalah pola komunikasi (arah komunikasi) pada Pendamping tingkat kecamatan/LKM adalah sebagian anggota malu bertanya saat rapat berlangsung dan baru bertanya setelah rapat melalui telepon kepada LKM atau Pendamping. Anggota kelompok yang malu bertanya saat rapat rutin kelompok berlangsung disebabkan oleh kurang percaya diri dan bingung apa yang mau ditanyakan. Masalah arah komunikasi terkait anggota kelompok afinitas yang malu bertanya saat rapat kelompok diungkapkan oleh salah satu informan penelitian.

“biasanya setelah rapat rutin anggota biasa melakukan telpon kepada kami karena pada saat rapat mungkin mereka kurang memahami maka mereka sering melakukan panggilan via telepon kepada kami tentang pembahasan masalah program ini”. (AKS, Desa Terentang III/01/03/2022)

Leasa (2018), keaktifan anggota kelompok afinitas memiliki pengaruh terhadap dinamika kelompok sehingga setiap anggota mampu memberikan partisipasi dalam pertemuan kelompok. Hal ini juga didukung oleh motivasi anggota, metode pendamping dan kompetensi pendamping dalam mengarahkan saat rapat kelompok afinitas.

Temuan masalah pola komunikasi (arah komunikasi) juga terjadi pada Pendamping program KMP tingkat desa. Pendamping Swakarsa tingkat desa hanya sering menelpon pengurus kelompok saja (Ketua, Sekretaris dan Bendahara kelompok afinitas), sedangkan ke anggota kelompok jarang. Pendamping Swakarsa jarang berkomunikasi dengan menggunakan *handphone* dikarenakan banyak anggota kelompok afinitas yang tidak memiliki *handphone*. Hal ini menyebabkan isi/pesan komunikasi mengenai perkembangan usaha anggota kelompok hanya Pendamping Swakarsa dengan Pengurus kelompok afinitas saja yang mengetahuinya, sedangkan anggota kelompok lainnya tidak tahu perkembangan usaha anggota sesama kelompok afinitas. Masalah arah komunikasi Pendamping Swakarsa Desa Kurau dan Desa Kurau Barat dengan kelompok afinitas diungkapkan oleh salah satu informan.

“ke pengurusnya biasanya, ke pengurus kelompok afinitasnya karena tiap bulan kita kan harus tahu perkembangannya, pengembalian biasanya kan ada laporan, pasti menghubungilah pengurus”. (PNK, Desa Kurau, 18/02/2022)

Santoso et al., (2019), interaksi ketua kelompok dan anggota memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang dinamis serta kemantapan anggota untuk aktif dalam kelompok. Dukungan interaksi juga berkesinambungan dengan arus informasi yang didapat oleh kelompok (Euriga, 2018). Temuan masalah pola komunikasi (arah komunikasi) di tingkat desa selanjutnya adalah Ketua Kelompok Afinitas Desa Penyak hanya berkomunikasi dengan Tim Teknis kabupaten pada saat ada pelatihan saja. Hal ini disebabkan ketua kelompok jarang bertemu dengan Tim Teknis kabupaten sehingga komunikasi jarang dilakukan. Komunikasi sebaiknya dibangun tidak hanya pada saat pelatihan saja akan tetapi bisa dilakukan di setiap kesempatan baik pada saat pertemuan formal maupun pertemuan non-formal. Komunikasi hanya pada saat pelatihan diungkapkan oleh salah satu informan/Pendamping Swakarsa Desa Penyak ibu Ens umur 45 tahun. *“enggak, kecuali kalau ada pelatihan”*. (ENS, Desa Penyak, 21/03/2022)

Sugiarto et al., (2019) menjelaskan mengenai keaktifan kelompok menentukan keberhasilan kelompok dalam keberlanjutan usaha yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat pada intensitas dan frekuensi pertemuan kelompok. Aspek layanan dari pendamping program/ fasilitator dapat meliputi *tangibility*, *assurance*, *empathy*, *responsiveness* dan *reliability* yang terjadi pada kohesifitas kelompok binaan.

Temuan masalah pola komunikasi (arah komunikasi) di tingkat desa selanjutnya adalah ketua kelompok mengalami hambatan saat berkomunikasi dengan anggota kelompok afinitas saat berkunjung ke rumah mereka (anggota) terkadang tidak ada di rumah sehingga tidak bisa menyampaikan informasi secara langsung saat kunjungan ke rumah anggota. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan/ketua kelompok afinitas.

“yang menjadi hambatan gini, kadang-kadang kan mereka dihubungi kadang nggak ada di rumah, kemudian untuk menyampaikan pesan ini kadang-kadang tersampaikan tapi kadang juga istilahnya mereka tidak ada di rumah”. (MYD, Desa Kurau/01/03/2022)

Perlunya keaktifan dari anggota kelompok dalam meningkatkan kapasitas diri. Sehingga dorongan motivasi yang bersumber dari dalam perlu ditumbuhkan untuk meningkatkan kemampuan anggota, interaksi anggota dan semangat kebersamaan antar pihak. Kemampuan ini perlu didorong oleh pendamping untuk membangun kebersamaan dalam menjalankan program KMP (Setyowati et al., 2021; Sumardjo et al., 2022)

Temuan masalah pola komunikasi (arah komunikasi) yang terjadi pada program KMP di Kabupaten Bangka Tengah sejalan dengan hasil penelitian Hariani et al., (2017) yang meneliti pola komunikasi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) terhadap petani cengkeh di Desa Wa Ode Buri Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara menunjukkan bahwa pola komunikasi yang diterapkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yaitu, komunikasi satu arah, dua arah dan komunikasi multi arah. Setiap Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) menerapkan pola tersebut pada setiap melakukan penyuluhan pada masyarakat.

Hasil temuan lapangan mengenai isi/pesan komunikasi pada program KMP di Kabupaten Bangka Tengah yaitu informasi terkait program KMP yang disampaikan oleh Pendamping program/Tim Teknis kabupaten pada saat rapat kelompok di tingkat kabupaten, tidak semua bisa diterima oleh kelompok dikarenakan tidak semua perwakilan kelompok hadir pada saat rapat di Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini menyebabkan Tim Teknis harus melakukan sosialisasi lanjutan dan datang langsung ke kelompok afinitas yang ada di desa agar informasi tentang program KMP dapat diterima sama. Putusnya informasi terkait program KMP diungkapkan oleh salah satu informan Ketua Tim Teknis kabupaten.

“Kita sering yah kegiatan sosialisasi apapun kegiatannya di dinas kita ini. Baik itu P2L Pekarangan Pangan Lestari, terutama kelompok calon penerima itu kan wajib kita berikan sosialisasi, itu bisa kita undang ke kantor atau kita yang datang ke calon. Lokasi calon penerima, jadi bisa dua, bisa kita hadir atau dari beberapa kelompok kita undang ke (kantor). Ini ada kelebihan dan kekurangannya, kalau kita yang harus datang kita butuh waktu yang banyak menghadiri kelompok, kelompok penerima yah, tapi kalo kita undang ke kantor kita cukup sekali, mengundang beberapa calon penerima calon lokasi. Kelemahannya karena jarak lokasi ini tidak selalu berdekatan, kalo kita ambil tengah-tengah, kalo di Koba ini ibu kota kabupaten mungkin saja, kelompok calon penerima sekitar Koba tidak keberatan, tetapi kalo memang calon kelompok itu ada yang tinggalnya di Kecamatan Sungaiselan, Pangkalanbaru, butuh yah perhatian khusus, barangkali pada saat kita menyampaikan undangan itu beberapa kali kita tanya, bagaimana kesiapan untuk bisa hadir atau tidak, nah andaikan tidak bisa hadir, iya toh, itu kan jarang kan cuma 1 orang, biasanya ketua, sekretaris, bendahara, kegiatan apapun kita hadirkan minimal itu tiga, ketua, sekretaris, bendahara. Ini juga strategi kita supaya informasi itu tidak ada yang zero satu kelompok tadi itu, minimal paling tidak ada satu, dua orang yang hadir. Oke, seandainya dalam satu kelompok memang Ketua, Sekretaris, Bendahara tidak berhalangan, e berhalangan sama sekali tidak hadir, tidak ada, ini terpaksa kita memang yang harus menyampaikan. Kalo kami yang harus menitip pesan dengan kelompok lain, iya kalo itu tuh satu desa, kalo desa lain kemungkinan informasi itu tidak akan sampai, tidak akan lengkap. Makanya kadang kala kita harus mengalah kalau itu memang kelompok ini sudah ditetapkan sebagai calon penerima, kalo tidak, kita juga cari perhatian, berarti mereka tidak sungguh-sungguh, baru sebagai calon aja sudah enggan mencari informasi atau tidak hadir. Bisa saja akan kita ganti tapi, tapi tidak begitu, kalo memang desa lain itu satu desa, bisa saja kita sampaikan. Tolonglah sampaikan informasi ini secara lengkap karena mereka tidak ada satu pun anggota atau pengurus yang hadir, tapi kalo itu lain desa, minimal itu bisa kita terima alasannya mungkin kita akan hadir kesana, dan satu lagi fasilitas kan sekarang sudah ada, telepon bisa saja kita sampaikan, tetapi kan kalo itu terkait mau itu daftar hadir sebagai bukti pembinaan kita segala macem, pertimbangannya yang terakhir tadi kalo memang tidak bisa, kalo enggak sungguh-sungguh yah sudah, kita harus mencari yang serius gitu”. (ERD, Kota Koba, 25/02/2022)

Partisipasi meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Partisipasi merupakan hal yang menjadi titik penting dalam pengelolaan kelompok. Masing-masing anggota memiliki peran dalam

meningkatkan kualitas kelompok dan usahanya agar mampu berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan usaha. Perlunya peran serta masyarakat dalam mengontrol kegiatan kelompok afinitas agar berjalan sesuai harapan program KMP (Santoso et al., 2019).

Temuan lapangan mengenai pola komunikasi (isi/pesan komunikasi) selanjutnya adalah informasi tentang pembukuan kelompok yang disampaikan pendamping program tingkat kecamatan tidak langsung dikerjakan oleh pengurus LKM dengan alasan sibuk. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Informan/Pendamping program KMP tingkat kecamatan.

“misalkan kita memberikan informasi kepada LKM terkait agar membuat pembukuan kelompok, misalkan buku kas dan lain-lain tidak langsung dikerjakan dengan alasan sibuk”. (FZR, Desa Terentang III, 17/02/2022)

Partisipasi kelompok dalam kegiatan setiap program memberikan andil terhadap keberlanjutan. Setiap anggota mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan keberhasilan kelompok dalam mengelola usaha. Tujuan kelompok dibuat adalah agar adanya kesinambungan dan kontrol terhadap program yang dijalankan. Faktor yang mempengaruhi kelompok adalah motivasi anggota kelompok (Effendy & Apriani, 2018).

Temuan lapangan mengenai pola komunikasi (isi/pesan komunikasi) selanjutnya adalah pengambilan keputusan rapat pada tahap kemandirian hanya melibatkan desa Kawasan Mandiri Pangan yang aktif saja hal ini menyebabkan adanya informasi yang tidak sampai kepada anggota kelompok afinitas lainnya. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara LKM dengan kelompok afinitas yang tidak aktif. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan/Koordinator BPP Kecamatan Koba. *“kalau kemandirian ini kayaknya hanya desa yang aktif kayaknya”.* (HSN, Desa Penyak, 22/2/2022)

Proses dinamika kelompok dipengaruhi oleh proses keputusan dalam pelaksanaan program yang dievaluasi oleh pendamping program Kecamatan. Keputusan anggota memiliki dorongan yang besar dalam meningkatkan keputusan terhadap usaha yang dijalankan. Hal ini selaras dengan temuannya (Arman & Sembiring (2018) bahwa keputusan anggota kelompok menentukan kemajuan dari unit usaha yang dikelola anggota.

Temuan lapangan mengenai pola komunikasi (isi/pesan komunikasi) selanjutnya adalah materi pelatihan bagi anggota kelompok masih materi global sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok dan pendamping. Hal ini seperti yang diungkap oleh dua orang informan penelitian.

“kalau untuk kemaren kan secara global ya desa mandiri pangan itu secara global kemarin jadi menyangkut yang lain, jadi mungkin dipersempit misalnya kalo untuk program kawasan tersendiri dengan yang Mapan yang lain kaya gitu, emm”. (HSN, Desa Penyak, 22/2/2022)

“karene ku kan dakde muet-muet ano tuh, dakde bebuet toh”. (“karena saya usahanya bukan di bidang olahan produk akan tetapi materi yang disampaikan adalah tentang pengolahan”). (SSW, Desa Kurau Barat, 17/02/2022)

Materi atau isi/pesan dalam pendampingan memerlukan kesesuaian informasi yang dibutuhkan oleh anggota kelompok. Sehingga isi pesan, metode pesan, saluran pesan dan dampak pesan perlu menjadi pertimbangan pendamping dalam menentukan pesan program KMP yang disampaikan dalam pendampingan kelompok (Rusdy & Sunartomo, 2020; Slavik et al., 2021).

Temuan lapangan mengenai pola komunikasi (isi/pesan komunikasi) selanjutnya adalah terdapat perbedaan informasi terkait diperbolehkan atau tidaknya menggunakan modal usaha antara Pendamping program tingkat kabupaten, Pendamping program tingkat kecamatan dan Pendamping Swakarsa tingkat desa. Berdasarkan petunjuk teknis program KMP bahwa anggota kelompok yang meminjamkan dana program KMP tidak diperbolehkan lagi meminjam dana dari program lainnya atau melalui bank. Apabila ada anggota yang memiliki pinjaman di pihak lain bersamaan dengan pinjaman dana program KMP hal ini akan mempersulit anggota kelompok itu sendiri dalam pembayaran angsuran per bulan ke LKM. Masalah isi/pesan komunikasi Pendamping Swakarsa Desa Kurau dan Desa Kurau Barat dengan kelompok afinitas diungkapkan oleh salah satu informan/Pendamping Swakarsa Desa Kurau dan Desa Kurau Barat.

“ada dari dana KUR Pak, kalau salah satu anggota pengolah saya yang sudah berapa ton produksi getasnya per bulan selain dari kelompok afinitas itu dana KUR biasanya”. (PNK, Desa Kurau, 18/02/2022)

Karakteristik pesan yang diterima masyarakat dan pendamping memiliki perbedaan yang sangat nyata. Hal ini memperlihatkan bahwa pesan yang diterima dipengaruhi oleh karakteristik penerima manfaat, persepsi dan keuntungan yang didapat serta kerumitan sehingga pesan yang diolah tidak sama dalam penerimaan pesan bagi anggota (Ellyta et al., 2022).

Temuan lapangan mengenai pola komunikasi (isi/pesan komunikasi) mengenai perbedaan informasi yaitu tidak semua penerima manfaat program KMP di Desa Guntung adalah Rumah Tangga Miskin (RTM). Hal ini berbeda dengan arahan dari Pendamping program tingkat kabupaten dan Pendamping program tingkat kecamatan terkait penerima manfaat program KMP yaitu harus Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kawasan Mandiri Pangan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan.

“a karena dari peminjaman untuk masyarakat miskin itu, untuk apa namanya, biasanya pinjamnya untuk anak sekolahnya, ada juga yang tidak miskin itu untuk mengembangkan usahanya, gitu”. (ATI, Desa Guntung, 23/2 2022).

Ellyta et al. (2022) mengungkapkan bahwa perbedaan informasi memiliki kendala dalam menyamakan persepsi. Hal ini disebabkan oleh tujuan dan arah serta metode penyampaian memiliki andil memberikan pengertian yang sama terhadap penerima informasi. Temuan lapangan mengenai pola komunikasi (isi/pesan komunikasi) selanjutnya adalah adanya kesalahpahaman tentang mengingatkan jatuh tempo pinjaman, anggota beranggapan bahwa pendamping swakarsa yang mengingatkan jatuh tempo pinjaman adalah menagih pinjaman, padahal itu adalah sekedar mengingatkan agar anggota kelompok afinitas tidak terlambat membayar angsuran atau pinjaman bulanan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan. *“Keluhannya itu kadang-kadang simpan pinjam nih penagihannya itu lum datang tanggal e lah datang orangnya”.* (BHN, Desa Terentang III, 21/03/2022).

Koordinasi antara pendamping dan penerima manfaat belum terjadi saling kecocokan. Hal ini menjadi penghalang dan faktor ketidaktercapainya kesepahaman antara pendamping dan kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi perlu dibangun dalam berbagai tingkatan level dan situasi komunikasi yang terjadi (Conrad, 2022; Sutriadi & Wulandari, 2014).

Temuan kesalahpahaman mengenai isi/pesan komunikasi sejalan dengan penelitian Djamereng & Irmayana, (2018), faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses komunikasi organisasi antara pimpinan dan karyawan dalam meningkatkan motivasi kerja dan faktor penghambatnya ialah kesalahpahaman atau *miss communication* (Villanti et al., 2021; Waring, 2019).

Adanya temuan lapangan mengenai isi/pesan komunikasi seharusnya menjadi fokus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus menyampaikan isi/pesan komunikasi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Isi/pesan komunikasi yang diperlukan untuk keberlanjutan program KMP ke depan seharusnya adalah: 1) isi/pesan yang bersifat teknis terdiri dari isi/pesan mengenai pengelolaan program KMP oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) secara baik dan benar, 2) isi/pesan mengenai teknik pengelolaan keuangan (penyaluran, pengembalian dana program, penggunaan dana pinjaman untuk usaha ekonomi produktif), 3) isi/pesan mengenai peran pendamping program KMP diberbagai tingkatan mulai dari peran Pendamping tingkat Provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, hingga ke tingkat desa, 4) isi/pesan mengenai kredibilitas Pendamping, penguasaan bahasa, penguasaan materi, *ice breaking*, kepemimpinan, penguasaan dinamika kelompok, dan pentingnya membangun jejaring/mitra usaha, dan 5) isi/pesan mengenai keberlanjutan usaha seperti pemasaran digital, inovasi produk dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara temuan di lapangan mengenai masalah-masalah pola komunikasi juga ditemukan pada frekuensi komunikasi. Temuan lapangan diantaranya adalah komunikasi antara Tim Teknis kabupaten dengan pendamping swakarsa pada tahap *exit* strategi keberlanjutan agak jarang dilakukan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan/anggota Tim Teknis kabupaten/Kepala Seksi Kerawanan Pangan. *“Agak jarang kalo komunikasi ke pendamping swakarsa, langsung ke pengurusnya/LKM”.* (AMR, Kota Koba, 21/02/2022)

Temuan lapangan mengenai pola komunikasi (frekuensi komunikasi) selanjutnya adalah rapat hanya intens pada saat rapat pencairan dana saja, sehingga komunikasi jarang dilakukan pada tahap *exit* strategi keberlanjutan program KMP. Hal ini diungkapkan oleh informan penelitian.

“kalo rapat itu, setahu saya pak pada saat meminjamkan uang saja, mereka rapat Pak, tetapi inisiatif saya itu, setiap satu minggu atau dua pekan sekali atau dua minggu sekali itu saya selalu menghubungi dan menelpon ketua LKMnya untuk mengetahui perkembangannya. Kalau

mengharapkan dari ketua sendiri itu mungkin bisa bulan-bulanan pak menghubungi kita. Perluanya mereka menghubungi kita Pak”. (FZR, Desa Terentang III, 17/02/2022)

Temuan lapangan mengenai pola komunikasi (frekuensi komunikasi) selanjutnya adalah Pendamping program KMP tingkat kecamatan (Pendamping pengganti) tidak mengunjungi lagi kelompok afinitas sehingga komunikasi terjadi hanya saat pertemuan/rapat di LKM saja.

“kalo desanya nggak pernah saya mengunjungi Pak ya, kan masing-masing desa itu ada Penyuluh swakarsanya ya..jadi mereka yang mengunjungi di anggota LKM, jadi kami bertemu janji aja Pak di sekretariat”. (FZR, Desa Terentang III, 17/02/2022)

Temuan lapangan mengenai jarang atau tidak rutusnya frekuensi komunikasi tidak selaras dengan penelitian (Wahyuni et al., 2019) meneliti tentang pola komunikasi terhadap keberlanjutan penerapan padi salibu di Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi para pelaku dalam menerapkan padi salibu sudah berlangsung baik, dimana tipe komunikasi yang diterapkan berlangsung dialogis dengan melibatkan partisipasi seluruh pelaku, arah komunikasi berlangsung ke segala arah (konvergen), frekuensi komunikasi sering dilakukan, dan kualitas komunikasi berlangsung baik di mana pelaku sama-sama memahami makna pesan yang disampaikan. Hal ini memperkuat dari penelitian (Wahyuni et al., 2019) bahwa komunikasi terbentuk oleh waktu dan cara berkomunikasi dalam media komunikasi diantara anggota kelompok. Temuan lapangan mengenai pola komunikasi (frekuensi komunikasi) selanjutnya adalah pada tahap *exit* strategi keberlanjutan, terkadang Pendamping Program tidak diundang pada saat rapat kelompok. Pendamping program jarang dikasitahu kalau ada rapat kelompok. Hal ini diungkapkan oleh informan penelitian.

“sewaktu saya jadi Penyuluh/Pendamping Program KMP saya jarang dikasitahu kalo ada rapat-rapat kelompok jarang diundang, kemudian masalah data kelompok/pembukuan siapa saja yang menggunakan dana program KMP saya tidak diberitahu oleh LKM”. (YPD, Desa Terentang III, 16/02/2022)

Temuan-temuan lapangan mengenai frekuensi komunikasi yang jarang atau tidak rutin yang dilakukan oleh Pendamping program KMP di Kabupaten Bangka Tengah, berbeda dengan hasil penelitian dari (Agustini et al., 2020) bahwa para petani kopi melakukan komunikasi yang intensif dan lama, komunikasi yang dilakukan pemimpin kelompok petani dengan *stakeholder* juga dilakukan dengan intensif dan terpola. Adapun penyebab tidak rutin atau jaranginya frekuensi komunikasi antara Pendamping program KMP dengan penerima manfaat program KMP, dikarenakan lemahnya pengawasan program KMP yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Kawasan (FKK) dan Tim Teknis program tingkat kabupaten.

Pada tahap *exit* strategi keberlanjutan seluruh pengelolaan dana program KMP sepenuhnya dikelola oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) “Kebersamaan” Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Koordinasi dan komunikasi antara LKM dengan Pendamping program KMP tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten hanya terjalin pada saat pencairan dana program KMP saja. LKM hanya melibatkan ketua FKK saja sedangkan anggota FKK sudah jarang diundang untuk mengikuti rapat kelompok afinitas. Selain itu pengurus LKM sudah jarang melibatkan Pendamping program KMP dalam memverifikasi usaha dan menganalisis usaha bagi calon penerima manfaat program KMP.

Penelitian hanya berfokus pada pola komunikasi organisasi dari segi arah komunikasi, isi/pesan, frekuensi, aktivitas komunikasi Pendamping program KMP, dan dampak program KMP. Penelitian perlu didukung penelitian lanjutan dengan melihat aspek kredibilitas Pendamping program KMP yaitu keahlian, keakraban dan daya tarik (Latifah & Muksin, 2020) bahwa proses komunikasi yang mengalir akan menghasilkan pola bintang dan sirkuler yang melibatkan komunikasi dua arah dan interaksional antara komunikan dan komunikator. Adapun berkenaan dengan komunikasi budaya antar pelaku maka memperkuat penelitian bahwa komunikasi yang berbeda akan membentuk komunikasi transaksional dalam menemukan pemahaman makna dalam pendamping program KMP (Novianti, 2014). Penguatan penelitian (Nuridayati & Hasan, 2021) menyatakan bahwa komunikasi program akan lebih efektif dikelola oleh kelompok sosial karena memungkinkan individu melakukan dialog dan menukarkan nilai dan kearifan lokal serta modal sosial yang ada di masyarakat. Hal ini menegaskan dari hasil penelitian Susanty (2013) menunjukkan bahwa keahlian dan daya tarik Pendamping program/fasilitator berhubungan nyata dengan arah komunikasi. Hal lain dari penelitian yang belum dilakukan adalah perlu adanya penelitian mengenai aspek keberlanjutan program KMP.

KESIMPULAN

Pola komunikasi organisasi yang menjadi temuan pada program Kawasan Mandiri Pangan di Kabupaten Bangka Tengah ada 2 jenis yaitu pola komunikasi *chain pattern* dan pola komunikasi *star pattern*. Pola komunikasi *chain pattern* terjadi pada tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian program KMP. Pola komunikasi *star pattern* terjadi pada tahap *exit* strategi keberlanjutan program KMP. Pola komunikasi *chain pattern* menunjukkan pola komunikasi dalam program pembangunan yang bersifat *top-down* yang melibatkan pemerintah sebagai inisiator kegiatan pada program Kawasan Mandiri Pangan. Akan tetapi pada tahapan pelaksanaannya pelibatan masyarakat sebagai pelaksana dan pemunculan ide usaha serta keberlanjutan usaha diserahkan pada tingkat daerah dan masyarakat setempat sebagai pelaku pada program Kawasan Mandiri Pangan. Hal ini bertujuan untuk membangun dinamika komunikasi yang baik sehingga tercipta pola komunikasi *star pattern*. Oleh karena itu pembentukan pola komunikasi pada program pemerintah akan sering terjadi dengan kedinamisan masyarakat dalam menerima program.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada para pembimbing, ketua komisi pembimbing ibu Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala S Hubeis dan anggota komisi pembimbing ibu Dr. Annisa Utami Seminar, S.IP., M.Si yang telah membimbing dan banyak memberikan saran kepada saya. Ungkapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang telah memberikan beasiswa selama saya menempuh pendidikan di IPB university.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, P., Miharja, E., & Widiastuti, T. (2020). Liberica Coffe Farmers Group Communication Pattern For Support Of Sukorejo Ecotourism . *J IIK*, 19(1), 82–90. <https://doi.org/10.325509/Wacana.V19i1.1009>.
- Ali, I., & Anisti. (2015). Pola Komunikasi Organisasi Forum Leader Pada Aktivitas Evaluasi Bandung Clean Action. *Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Bahasa*, 2(2), 149–163. <https://doi.org/10.31294/Kom.V2i2.848>
- Anastasya, A., Setadi, H., & Anggrahita, H. (2019). Society Willingness To Pay Towards Application Of Renewable Energy For Household Electricity Needs In Kepulauan Seribu Regency. Sustainable Islands Development Initiatives. *International Conference 2019*. 649, 1–7.
- Arman, I., & Sembiring, A. F. (2018). Analisis Pengambilan Keputusan Petani Dalam Program Peremajaan Kelapa Sawit Di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. *Agrica Ekstensia*, 12(2), :47-60.
- Bagherzadeh, M., Jafari, H., Charati, J. Y., & Shafipour, V. (2021). The Effect Of An Empowerment Program On The Moral Sensitivity And Caring Behaviors Of Emergency Nurses In Iran. *Nurse Education In Practice*, 57, 103243. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103243>
- Brahmana, D., & Sitepu, E. (2020). Pola Komunikasi Organisasi Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Di Kantor Lurah Gung Leto Kecamatan Kabanjahe. *J IIK Socio Opinion*, 5(2), 1–9.
- Conrad, C. (2022). Communication And The Principle Of Intersubjectivity: Towards An Integrational Account Of Communication, Part 1. *Language And Communication*, 86, 10–17. <https://doi.org/10.1016/j.langcom.2022.06.006>
- De Vito, J. (2019). *The Interpersonal Communication Book, 12th Edition*. Allyn & Bacon.
- Djamereng, A., & Irmayana. (2018). Pola Komunikasi Organisasi (Studi Kasus Di PT Harian Amanah Al Haram). *J Alkhitabah*, 4(2), 49–63.
- Effendy, L., & Apriani, Y. (2018). Motivasi Anggota Kelompok Tani Dalam Peningkatan Fungsi Kelompok. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 10–24.
- Ellyta, E., Rizieq, E. R., & Anggreni, M. (2022). Analysis Of Farmers' Perceptions Of The Rice Farming AUTF Program In Landak Regency. *3rd International Conference On Agriculture And Bio-*

Industry (ICAGRI 2021), 1–7.

- Euriga, E. A. S. F. A. A. P. (2018). Implementasi Penyuluhan Hortikultura Berkelanjutan Di Provinsi D.I. Yogyakarta. *Jurnal Penyuluhan*, 14(2), 289–307. <https://doi.org/https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v14i2.19555>
- Hariani, Umran, L., & Masrul. (2017). *Pola Komunikasi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Terhadap Petani Cengkeh Di Desa Wa Ode Buri Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara*. [[Laporan]]. Kendari (ID): Universitas Halu Oleo.
- Hermawan, A., Amanah, S., & Fatchiya, A. (2017). Partisipasi Pembudidaya Ikan Dalam Kelompok Usaha Akuakultur Di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 1–13. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/view/12903>
- [Kementan] Kementerian Pertanian Republik Indonesia RI. (2017). *Petunjuk Teknis Program Kawasan Mandiri Pangan*. Kementan.
- Latifah, W., & Muksin, N. N. (2020). POLA KOMUNIKASI DALAM METODE COACHING PEGAWAI RSUD R. SYAMSUDIN, SH KOTA SUKABUMI. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 4(2), 145–154.
- Leasa, W., Amanah, S., & Fatchiya, A. (2018). Kapasitas Pengolah Ubi Kayu “Enbal” Dan Pengaruhnya Terhadap Keberlanjutan Usaha Di Maluku Tenggara. *Jurnal Penyuluhan*, 14(1), 11–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v14i1.17843>
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2014). *Theories Of Human Communication*. Salemba Humanika.
- Mahmud, D., & Swarnawati, A. (2020). Pola Jaringan Komunikasi Organisasi Pada Havara Organizer Pt. Havara Ruhama Ramadhani Di Tangerang Selatan. *J IKPKB*, 4(1), 1–11.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis Ed Ke-3*. Sage Publications.
- Novianti, E. (2014). POLA KOMUNIKASI PASANGAN ANTARETNIK SUNDA-MINANG DI BANDUNG. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 2(2), 161–172. <https://doi.org/10.24198/jkk.v2i2.7383>
- Nuridayati, M. R., & Hasan, K. (2021). Empowerment Communications As A New Perspective In The Empowerment Of Coastal Communities Of Pase Raya. *Proceedings Of The International Conference On Social Science, Political Science, And Humanities (Icospolhum 2020)*, 495, 24–31. <https://doi.org/DOI:10.2991/assehr.k.210125.005>
- Pahlawan, F., & Prabowo, C. B. A. (2020). Pengaruh Karakteristik Individu, Intensitas Penggunaan Smartphone Dan Interaksi Sosial Terhadap Perilaku Phone And Snubbing Karyawan Lifepal®. *Syntax*, 2(5), 61–67. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/257>
- Rusdy, S., & Sunartomo, A. (2020). Proses Komunikasi Dalam Penyuluhan Pertanian Program System Of Rice Intensification (SRI). *Jurnal Komunikasi Dan Penyuluhan Pertanian*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/DOI:10.19184/jkrn.v1i1.20309>
- Santoso, S., Nurrochmat, D., Nugroho, B., & Santoso, I. (2019). Keberterimaan Kelompok Tani Hutan Pada Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Di KPH Yogyakarta Dan KPH Wilayah IX Panyabungan. *Jurnal Penyuluhan*, 15(2), 169–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.22500/15201927731>
- Sarah, N., & Waluyo. (2020). Pengaruh Penerapan Pola Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pusat Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bisnis & Pariwisata Jakarta. *J Sekretari Unpam*, 7(2), 121–129.
- Setyowati, N., Ihsaniyati, H., Sanjaya, A. P., & Widiyanto. (2021). Sikap Petani Terhadap Pengolahan Kopi Robusta Berbasis Indikasi Geografis Di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Penyuluhan*, 17(2), 218–227.
- Simanjuntak, Y. R. (2017). *Pola Komunikasi Organisasi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis) Berbasis Kinerja Karyawan (Studi Kasus PT. Perkebunan Nusantara V Unit Kebun Tandun Riau)*.
- Slavik, C. E., Darlington, J. C., Buttle, C., Sturrock, S. L., & Yiannakoulis, N. (2021). Has Public Health Messaging During The COVID-19 Pandemic Reflected Local Risks To Health?: A Content

- Analysis Of Tweeting Practices Across Canadian Geographies. *Health & Place*, 69, 102568. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2021.102568>
- Sugiarto, M., Setiana, L., & Subejo, S. (2019). Kualitas Pelayanan Penyuluhan Pada Peternak Kambing Skala Kecil Di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Penyuluhan*, 15(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v15i1.21002>
- Sukarji, G. (2017, November 6). *Peran Komunikasi Dalam Organisasi*. <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/artikel/peran-komunikasi-dalam-organisasi>.
- Sumardjo, Firmansyah, A., & Dharmawan, L. (2022). Private Extensionists' Role In An Effort To Achieve Sdgs Through Peri-Urban Community Empowerment. *Jurnal Penyuluhan*, 18(02), 296–306. <https://doi.org/10.25015/18202240906>
- Susanty, P. (2013). *Komunikasi Partisipatif Pada Pelaksanaan Program Pendidikan Lingkungan Hidup Green School Di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi* [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Sutriadi, R., & Wulandari, A. (2014). Towards A Communicative City : Enhancing Urban Planning Coordination By The Support Of Information And Communication Technology. Case Study Bandung Metropolitan Area, Indonesia. *Procedia - Social And Behavioral Sciences* 135, 135, 76–81.
- Villanti, A. C., Lepine, S. E., West, J. C., Cruz, T. B., Stevens, E. M., Tetreault, H. J., Unger, J. B., Wackowski, O. A., & Mays, D. (2021). Identifying Message Content To Reduce Vaping: Results From Online Message Testing Trials In Young Adult Tobacco Users. *Addictive Behaviors*, 115, 106778. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106778>
- Wahyuni, S., Zulvera, Z., Tanjung, H., & Arif, E. (2019). Hubungan Karakteristik Inovasi Dan Kearifan Lokal Terhadap Keberlanjutan Penerapan Teknologi Padi Salibu Di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 15(1), 72–80.
- Waring, H. Z. (2019). Problematizing Information-Seeking Wh-Questions. *Language & Communication*, 64, 81–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.langcom.2018.11.001>
- Widiarto, D. (2018). Pola Komunikasi Organisasi: Komunikasi Vertikal Pada Cv. Kios Cetak Utama Surabaya. *Metacommunication; Journal Of Communication Studies*, 3(1), 67–77. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/mc.v3i1.4685>